

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi politik memiliki peranan penting bagi Anggota DPRD Sulawesi Barat, karena komunikasi politik ini digunakan sebagai medium dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memberi pertanggung jawaban kepada masyarakat terhadap aspirasi yang diamanahkan. Dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat tersebut, anggota DPRD melaksanakan kegiatan reses ke daerah pemilihannya masing-masing. Selain itu, tidak hanya komunikasi politik saja yang perlu dilakukan, akan tetapi sebuah strategi juga diperlukan agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Pelaksanaan Reses merupakan komunikasi dua arah antara anggota legislatif dengan konsituen (rakyat/pemilih) melalui kunjungan kerja secara berkala.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun Tata Tertib DPRD tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk aspirasi, hanya menyebutkan bahwa kewajiban DPRD adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Melalui kegiatan reses, para anggota dewan bisa menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di

dapil masing-masing sebagai bentuk perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Adapun masa reses di DPRD Provinsi Sulawesi Barat dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun atau dengan kata lain sebanyak 14 kali masa reses dalam periode lima tahun pada masa jabatan DPRD.

Dalam menyerap aspirasi masyarakat yang multicultural, tentunya diperlukan strategi komunikasi politik dan pendekatan yang berbeda-beda pula, yang sesuai dengan karakteristik tiap daerah. Perlu diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini dibentuk pada 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004. Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat berada di Kota Mamuju. Luas wilayahnya sekitar 16,796.19 km. Suku-suku yang ada di provinsi ini terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku lainnya (19,15%).

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 (enam) kabupaten diantaranya Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Provinsi Sulawesi Barat memiliki jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk BPS pada tahun 2022 berjumlah 1.458.606 jiwa (sulbar.bps.go.id).

Masyarakat Sulawesi barat merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Sulawesi Barat dan juga pendatang. Penduduk asli Provinsi Sulawesi Barat termasuk suku Mandar, Mamasa, Pattae, dan Kalumpang. Suku Mandar tersebar di semua wilayah kabupaten di Sulawesi Barat, kemudian suku toraja Mamasa kebanyakan berada di kabupaten Mamasa. Sementara suku Makki berada di kecamatan Kalumpang dan Bonehau. Suku Pattae berada di Kabupaten Polewali Mandar, dan suku lainnya tersebar di wilayah kabupaten, termasuk suku pendatang.

Akibat latar belakang masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat yang berbeda suku dan budaya di tiap daerah, maka Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat juga perlu menguasai Komunikasi Antar Budaya sebagai suatu strategi komunikasi politik dalam menyerap aspirasi masyarakat. Penyerapan Apirasi yang dilakukan oleh Aggota DPRD Sulawesi Barat melalui pendekatan Komunikasi Antar Budaya membantu Anggota DPRD Sulawesi Barat dalam berinteraksi, bertukar informasi, dan berkomunikasi dengan masyarakat, kelompok masyarakat di luar dari budayanya. Komunikasi ini juga mencakup segala aspek komunikasi termasuk Bahasa verbal dan non-verbal, norma-norma sosial, nilai-nilai, keyakinan, dan praktik-praktik yang dipahami dan digunakan oleh kelompok budaya yang berbeda.

Penting untuk diketahui bahwa budaya mencakup berbagai elemen seperti agama, Bahasa, tradisi, norma, perilaku, system nilai, dan sejarah yang membedakan satu kelompok dari yang lain. Ketika individu atau kelompok dari budaya yang berbeda berkomunikasi, perbedaan-perbedaan ini dapat memengaruhi cara pesan disampaikan, diterima, dan diinterpretasi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2023, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Barat terbagi menjadi tujuh Daerah Pemilihan (7 Dapil), Jumlah kursi sebanyak 45 kursi dewan. PKPU 6/2023 mengatur tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Berikut daftar pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan jumlah kursinya, mengacu PKPU Nomor 6 Tahun 2023:

- 1) Dapil Sulbar 1 Kabupaten Mamasa, 6 Kursi
- 2) Dapil Sulbar 2 Kabupaten Polman A, 8 Kursi
- 3) Dapil Sulbar 3 Kabupaten Polman B, 7 Kur5is
- 4) Dapil Sulbar 4 Kabupaten Majene, 5 Kursi
- 5) Dapil Sulbar 5 Kabupaten Mamuju, 9 Kursi
- 6) Dapil Sulbar 6 Kabupaten Mamuju Tengah, 4 Kursi
- 7) Dapil Sulbar 7 Kabupaten Pasangkayu, 6 Kursi

Adapun daftar pemilih tetap (DPT) di Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2019 sebanyak 865.244 jiwa yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 422,013 dan perempuan 419,992 jiwa. Selain itu jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 3,857 di enam kabupaten, 69 kecamatan dan 648 desa di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamasa memiliki jumlah DPT 115,157, Kabupaten Polewali Mandar memiliki jumlah DPT 303,006, Kabupaten Majene memiliki DPT 110,177, Kabupaten Mamuju memiliki jumlah DPT 155,704, Kabupaten Mamuju Tengah memiliki DPT sebanyak 70,184 dan Kabupaten Pasangkayu memiliki jumlah DPT 87,777.

Table.1
Jumlah DPT Per Kabupaten

Mamasa	115,157
Polewali Mandar	303,006
Majene	110,177
Mamuju	155,704
Mamuju Tengah	70,184
Pasangkayu	87,777
Total DPT	865.244

Keberadaan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat di tiap daerah pemilihan ialah agar masyarakat turut berperan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui para wakilnya yang berada di DPRD. (Awang, 2010) mengemukakan bahwa peran anggota DPRD ialah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkenaan dengan masalah hubungan antara badan tersebut dengan anggota masyarakat yang diwakili mereka secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan, sehingga secara prinsip, setiap wakil rakyat haruslah melihat dirinya sebagai mewakili warga negara yang berada di dalam batas ruang lingkup daerah pemilihannya.

Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama enam hari kerja. Pada masa ini anggota DPRD secara perseorangan mengunjungi daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan setiap anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses dan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Idealnya reses adalah sarana komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat (konstituen) di daerah pemilihannya. Sehingga anggota dewan dapat menyerap aspirasi, menerima pengaduan dan gagasan-gagasan yang berkembang di daerah. Selain itu reses dapat menjadi forum

penyampain pertanggungjawaban dari anggota dewan yang bersangkutan. Anggota dewan akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana follow-up dari reses sebelumnya serta apa agenda strategis yang akan dilakukan ke depan. Namun kenyataannya pelaksanaan reses menjadi sorotan bagi masyarakat beserta pihak-pihak yang berkepentingan baik itu para pengamat politik, stakeholders ataupun LSM.

Pelaksanaan masa reses yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dilakukan pada Masa Reses I di Bulan April, Masa Reses II di Bulan Agustus dan Masa Reses III dilaksanakan di bulan Desember. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada masa reses yaitu berkaitan dengan proses menyerap dan menghimpun aspirasi yang dirangkaikan dengan kegiatan dialog publik, seminar, dan pelatihan.

Dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang heterogen, tentunya Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat diharuskan memiliki kemampuan komunikasi politik yang mumpuni serta mampu merancang strategi komunikasi politik yang dapat melancarkan aktivitas penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.

Beberapa permasalahan reses yaitu tidak terserapnya aspirasi masyarakat karena kurangnya koordinasi antar anggota DPRD maupun Pemerintah, laporan reses tidak sesuai dengan realita di lapangan, tindak

lanjut hasil reses dan temuan reses tidak sesuai dengan realita di lapangan, hasil reses tidak dipublikasikan secara maksimal, absensi kehadiran masyarakat pada saat reses cenderung dimanipulasi dan sebagainya. Permasalahan tersebut menjadi gambaran besar atas permasalahan yang juga ditemui dalam pelaksanaan reses lainnya. Hasil dari reses idealnya dapat menjembatani aspirasi, menjabarkan program-program dari DPRD terpilih, mengetahui kondisi secara riil dan mengevaluasi setiap program-program yang ada sehingga kinerja dari anggota DPRD diketahui dengan baik oleh masyarakat dan dapat menjawab kebutuhan serta permasalahan dari masyarakat di daerah pemilihannya (Abdulrahman, 2016)

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di salah satu dapil di Sulawesi Barat, peneliti menemukan beberapa permasalahan seperti konsituen mengeluh karena anggota DPRD yang mereka pilih sebagai wakil rakyat kurang akomodatif dan jarang berkunjung dan berkomunikasi dengan konsituennya, sehingga konsituen merasa kehilangan saluran komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasinya. Selain itu, beberapa anggota DPRD juga ada yang pernah berkunjung untuk menyerap aspirasi, akan tetapi aspirasi yang disampaikan tidak terealisasi dalam bentuk proyek pembangunan atau program di daerah mereka. Komunikasi menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota DPRD dalam menyerap aspirasi dan mewujudkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, dan niat

untuk berkomunikasi dengan masyarakat dinilai belum cukup, perlu adanya usaha dan strategi dalam menyerap aspirasi masyarakat, mengingat ada berbagai faktor tantangan dalam memengaruhi komunikasi dan mewujudkan aspirasi tersebut.

Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi jalannya komunikasi (Cangara, 2016) Unsur ini dapat digolongkan menjadi lingkungan fisik, sosial dan psikis. Dapil (daerah pemilihan) merupakan salah satu unsur pengaruh lingkungan. Kondisi demografis dan wilayah dapil termasuk dalam lingkungan fisik sementara kondisi sosial masyarakat, tingkat pekerjaan termasuk salah satu lingkungan sosial yang pembahasannya menjadi subbagian yang tidak terpisahkan.

Lingkungan psikis menunjukkan kondisi situasi yang tepat untuk melakukan komunikasi mulai dari interaksi serta suasana. Ketika proses komunikasi itu terjadi dan lingkungan psikis ini bisa saja berlangsung bervariasi. Adanya rangkaian dan mekanisme yang panjang dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengharuskan anggota DPRD memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Meski dengan kemampuan komunikasi yang baik, tetapi pengalaman komunikasi yang didapatkan belum tentu juga baik dan ramah. Inilah asumsi yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Pengalaman komunikasi yang didapatkan sepanjang kegiatan menyerap aspirasi masyarakat tentu saja berbeda pada tiap-tiap anggota DPRD, apalagi hal ini berkaitan dengan daerah pemilihannya. Kondisi, kebutuhan, keinginan, dan masalah masyarakat yang berbeda pada tiap-tiap daerah pemilihan memberikan pengalaman komunikasi yang berbeda pula bagi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan tidak menutup kemungkinan anggota DPRD juga mendapatkan pengalaman komunikasi yang unik, penolakan, tingkah lucu masyarakat, gelagat aneh, perdebatan diantara masyarakat, ancaman, sanjungan yang berlebihan, hingga sikap apatis masyarakat mungkin saja menjadi pengalaman yang unik bagi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam berkomunikasi dengan masyarakat heterogen, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat perlu memahami bahwa setiap kelompok memiliki kebutuhan, kekhawatiran, dan kepentingan yang berbeda. Strategi komunikasi politik yang memperhitungkan keragaman dapat memperkuat hubungan antara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan masyarakat yang mereka layani. Karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis menuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam menyerap Aspirasi Masyarakat?
2. Bagaimana menyelesaikan hambatan yang ditemui Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam menyerap Aspirasi Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu:

1. Mengetahui Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam menyerap Aspirasi Masyarakat.
2. Mengetahui Bagaimana menyelesaikan hambatan yang ditemui Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam menyerap Aspirasi Masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan praktis, Adapun manfaatnya sebagai berikut:

- 1). Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmiah atau referensi bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai

Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD dalam menyerap Aspirasi Masyarakat.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca khususnya dalam bidang ilmu komunikasi dan kajian komunikasi politik.

2). Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan mengenai Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD dalam menyerap Aspirasi Masyarakat atau dalam lingkup yang lebih luas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan pihak-pihak lain, termasuk instansi pemerintahan baik di lingkup Provinsi Sulawesi Barat maupun Nasional sebagai bahan pertimbangan dalam memahami strategi komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Strategi Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (Surbakti, 2010). Komunikasi politik juga diartikan sebagai proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok – kelompoknya pada semua tingkat masyarakat (Althoff & Rush, 2005) Sementara itu, Karl W. Deutsch dalam (Althoff & Rush, 2005) menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada satu sistem politik lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik merupakan unsur yang dinamis dari suatu sistem yang dinamis.

Dalam (Arifin, 2011), juga mengatakan bahwa strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Hal-hal penting yang bisa dilakukan seorang komunikator politik dalam menjalankan strategi komunikasi politik yaitu dengan merawat ketokohan

(citra diri politik), memantapkan kelembagaan, memahami khalayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, dan seni berkompromi.

Dalam melakukan komunikasi politik terhadap konstituen di dapilnya, Anggota DPRD menjalankannya dalam bentuk komunikasi politik sebagai berikut (Nimmo, 2004) Pertama, Bentuk komunikasi interpersonal Merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu. Kedua, Bentuk komunikasi organisasi Menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak. Sementara itu Cangara dalam (Malik, 2021) menyebutkan unsur komunikasi politik meliputi sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek.

Faktor yang harus dipahami oleh Anggota DPRD sebagai komunikator politik dari khalayaknya yaitu motivasi, kebutuhan, pengetahuan, dan kemampuan khalayak mengakses pesan politik. Hal itu meliputi kondisi kepribadian dan fisik khalayak, yang terdiri atas (1) pengetahuan khalayak mengenai pokok persoalan, (2) kemampuan khalayak untuk menerima pesan melalui media yang digunakan, (3) pengetahuan khalayak terutama perbendaharaan kata yang digunakan.

Syarat-syarat dalam menentukan pesan persuasif dalam komunikasi politik yaitu menentukan tema dan materi yang sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak. (Schramm, 1955) menyebutkan syarat-syarat berhasilnya suatu pesan yaitu (1) pesan harus direncanakan dan disampaikan menarik agar memperoleh perhatian khalayak, (2) pesan

harus menggunakan tanda yang sudah dikenali oleh komunikator dan khalayak sehingga kedua belah pihak memiliki pengertian yang sama, (3) pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi daripada sasaran dan menyarankan agar cara-cara tersebut dapat mencapai kebutuhan itu, (4) pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi khalayak.

Pemilihan metode dalam penyampaian pesan politik harus disesuaikan dengan bentuk pesan, keadaan khalayak, fasilitas, dan biaya. Menurut (Arifin, 2011) ada beberapa metode komunikasi yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak, (1) redundancy, (2) canalizing, (3) informative, (4) persuasive, (5) educative, (6) coercive.

Metode redundancy dilakukan dengan mengulang-ulang pesan politik kepada khalayak. Manfaat metode ini yaitu khalayak cenderung lebih memperhatikan pesan yang disampaikan, selain itu khalayak juga tidak akan mudah lupa dengan pesan itu karena disampaikan berulang-ulang. Dalam metode canalizing, komunikator menyediakan saluran-saluran tertentu untuk menguasai motif-motif yang ada pada khalayak. Jadi, dalam proses komunikasi politik, komunikator harus terlebih dahulu mengenal khalayaknya, setelah itu mulai menyampaikan gagasan politik yang sesuai dengan kepribadian, sikap, dan motif-motif khalayak. Komunikator politik juga bisa memulai komunikasinya dari posisi khalayak

berada (start where the audience) kemudian diubah sedikit-demi sedikit ke arah tujuan komunikator politik.

Metode informatif, yaitu pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan metode memberi penerangan. Pesan yang disampaikan berisi tentang fakta dan pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga khalayak dapat menilai, menimbang, mengambil keputusan atas dasar pemikiran yang sehat. Metode persuasive, yaitu mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Metode ini dilakukan dengan mempengaruhi khalayak dan tidak memberi kesempatan untuk berpikir kritis, sehingga khalayak dapat terpengaruh secara tidak sadar. Metode educative, atau disebut juga metode mendidik. Dilakukan dengan cara memberikan suatu gagasan kepada khalayak berdasarkan fakta, pendapat, dan pengalaman yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

Metode coercive, yaitu mempengaruhi khalayak dengan cara memaksa. Metode ini biasanya berbentuk peraturan, perintah, dan intimidasi yang pelaksanaannya didukung kekuatan yang tangguh. Peningkatan frekuensi penggunaan komunikasi politik oleh rakyat merupakan pertanda peningkatan demokratisasi politik, disini hal yang penting adalah terbukanya saluran komunikasi politik masyarakat pada berbagai lembaga politik (Heryanto, 2018) Dalam komunikasi politik, seluruh media dapat digunakan karena tujuannya untuk membentuk pendapat umum. Media yang dimaksud

adalah media format kecil seperti poster, pamflet, dan media interaktif (cyber media), bukan media massa. Penggunaan media dalam komunikasi politik perlu dipilah untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi khalayak.

Peran komunikasi politik sebagai wujud dari strategi komunikasi politik hendaknya harus melihat situasi dan kondisi dari setiap individu atau masyarakat, dengan demikian strategi komunikasi yang dilakukan pada masing-masing individu atau masyarakat tadi tidaklah sama. Sebagai contoh: strategi komunikasi pengembangan masyarakat pantai akan berbeda dengan strategi komunikasi pengembangan masyarakat kota.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam menyusun strategi komunikasi politik adalah:

1. Komunikator Politik

Maksudnya adalah siapa yang akan menyampaikan informasi kepada khalayak sasaran, bisa berupa individu bisa pula berupa lembaga. komunikator hendaknya memiliki persyaratan yaitu memiliki kredibilitas dan keahlian (skill).

2. Politikus sebagai komunikator politik

Orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah harus dan memang berkomunikasi tentang politik Dinamakan calon atau pemegang jabatan inti adalah politikus, tak peduli apakah mereka dipilih ditunjuk, atau pejabat karier. Daniel Katz menunjukkan

bahwa pemimpin politik mempengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah perubahan demikian. Maksudnya, Dalam kewenangannya yang utama politikus itu berkomunikasi sebagai wakil atau suatu kelompok atau langganan; pesan-pesan politikus itu menunjuk dan atau melindungi tujuan kepentingan politik, artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompok

3. Profesional sebagai komunikator politik

Komunikator profesional mengendalikan keterampilan yang khas dalam mengolah simbol-simbol.

4. Aktivistis sebagai komunikator politik

Unsur dasar dalam jaringan komunikasi politikus adalah aparat formal pemerintah.

5. Pesan-pesan apa yang hendak disampaikan

Berisikan hal-hal apa yang ingin diinformasikan kepada khalayak sasaran. Apakah tentang gizi, tentang perlunya menjaga lingkungan, perlunya menjaga habitat orangutan dan sebagainya.

6. Pengaruh apa yang diinginkan (effect)

Setiap strategi komunikasi ingin mencapai tujuan tertentu pada diri khalayak sasarannya. Tujuan tersebut adalah terjadinya perubahan dalam diri khalayak yaitu:

- a. Terjadinya perubahan pendapat (to change the opinion)
- b. Terjadinya perubahan sikap (to change the attitude)

c. Terjadinya perubahan perilaku (to change behavior)

Dalam menyampaikan informasi, para komunikator menggunakan saluran komunikasi politik dan saluran komunikasi persuasif. Tipe-tipe saluran komunikasi politik dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Komunikasi Massa

Komunikasi Massa merupakan proses dalam penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator politik kepada komunikan atau khalayak umum melalui media massa, seperti media elektronik dan media cetak. Media ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu calon dalam pemilihan umum

b. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi Interpersonal merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator politik kepada komunikan secara langsung atau tatap muka (face to face). Misalnya saja dialog.

c. Komunikasi lembaga organisasi

Merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator politik kepada komunikan atau komunikasi vertical (dari atas ke bawah) dan horizontal (dari kiri ke kanan) sejajar. Contoh dalam pemilihan umum yaitu komunikasi antar pasangan calon dan tim suksesnya.

Komunikator politik yang handal juga harus mampu menjaga kehormatan diri, dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Ia harus mempunyai rekam jejak yang baik dalam perjuangan politik,

karena rekam jejak politik sangat mempengaruhi komunikasi dalam merespon komunikator. Menciptakan kebersamaan juga merupakan faktor kunci suksesnya komunikasi politik. Kebersamaan dapat diciptakan dengan memahami khalayak, yaitu dengan memahami keyakinan atau ideologi yang berkembang di masyarakat, serta menghormati agama, tradisi masyarakat setempat. Tak kalah pentingnya adalah komunikator harus memahami pengetahuan dan kemampuan khalayak dalam mengakses pesan-pesan politik, supaya tidak menimbulkan salah persepsi dari informasi yang disampaikan komunikator. Oleh karena itu diperlukan kepiawaian komunikator dalam Menyusun pesan persuasi.

Teori paling klasik dalam melakukan komunikasi politik dikenal dengan teori AIDDA atau Adaption Proses. Teori ini dapat diklasifikasikan pada metode persuasive, karena di dalam teori ini ada unsur membujuk dan memengaruhi massa seperti halnya yang dibahas pada metode persuasive. Adapun sigkatan AIDDA ini adalah : Attention, Interest, Desire, Decision, Action.

Proses komunikasi politik yang menggunakan metode AIDDA, cara kerjanya adalah dengan membangkitkan perhatian audiens atau komunikasi terlebih dahulu (Attention), dengan cara menumbuhkan minat atau kepentingan komunikasi (Interest), setelah minat khalayak atau komunikasi terpancing, mengakibatkan komunikasi memiliki Hasrat (Desire) untuk

menerima pesan, akhirnya diambil keputusan (Decision) untuk mengamalkan dalam bentuk Tindakan nyata (Action).

Strategi komunikasi politik pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendi, 2007) Berkaitan dengan pernyataan ini, strategi komunikasi politik merupakan paduan dari perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga Agar tujuan tersebut tercapai secara maksimal, strategi komunikasi politik harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis. Pendekatan bisa berubah sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.

2. Konsep Aspirasi Masyarakat

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan keberhasilan mencapai sesuatu. (Pahrudin & Amiruddin, 2023) mengatakan bahwa aspirasi mengandung dua pengertian, yakni di tingkat ide dan tingkat peran struktural. Di tingkat ide, aspirasi merupakan sejumlah gagasan verbal lapisan masyarakat sedangkan di tingkat peran dalam struktur, aspirasi adalah keterlibatan individu secara langsung dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini,

masyarakat berpeluang besar dalam menyampaikan tuntutan atau aspirasinya yang memang disediakan ruangnya oleh pemerintah daerah.

Keutamaan pelaksanaan aspirasi masyarakat adalah untuk menghindari makna ganda pembangunan, yakni sebagai ajang tipu daya elit kepada masyarakat dan sebagai perwujudan demokrasi palsu karena pembangunan hanya berupa sebuah gagasan untuk kepentingan elit belaka (Zuhriansyah, 2013) Untuk menghindari hal tersebut, anggota dewan harus menerapkan strategi dalam melakukan penjaringan aspirasi di daerah pemilihannya.

Terdapat dua macam proses penyerapan aspirasi masyarakat, yaitu penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD (Dwiyanto, 2003) Penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah yang diperankan oleh DPRD dapat dilakukan secara langsung (dialog tatap muka, seminar dan lokakarya, serta kegiatan kunjungan kerja) dan tidak langsung (konsultasi dengan Pemerintah Daerah). Adapun kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan DPR dengan peninjauan lapangan dan pertemuan warga lebih umum digunakan. Hasil pada kegiatan ini akan diajukan sebagai usulan program DPRD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Proses penyerapan aspirasi masyarakat mencakup kegiatan mendengar, menerima, mencatat berbagai kebutuhan, keinginan, kepentingan, dan tuntutan dari masyarakat pada daerah pemilihan anggota DPR. Menurut Archon Fung yang dikutip (Susanto et al., 2021) terdapat tiga metode untuk memahami aspirasi masyarakat, yakni menentukan luas lingkup partisipasi. Hal ini dapat dilihat melalui lima model; (1) self selected, masyarakat dapat sepenuhnya menyalurkan aspirasi; (2) rekrutmen terseleksi, hanya orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan; (3) random selection, pemilihan secara acak beberapa individu yang mewakili komunitas; (4) lay stakeholders, beberapa warga yang sukarela mau bekerja tanpa dibayar; dan (5) professional stakeholders, tenaga profesional yang diberi honorarium. Kedua, melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya. Ketiga, melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan.

(Wasistiono & Wiyoso, 2009) mengungkapkan bahwa terdapat lima hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan reses DPRD sebagai berikut: (1) waktu reses yang harus sesuai dengan kegiatan masyarakat; (2) tempat reses harus strategis, netral, dan sesuai anggaran kegiatan reses; (3) kelompok sasaran yang sesuai dengan tujuan reses; (4) dukungan anggaran yang cukup sesuai kebutuhan; dan (5) data dasar dapil yang mencakup kondisi geografis, demografi, sosial ekonomi, dan prasarana.

Dengan demikian, peranan dan partisipasi masyarakat sendiri sangat diperlukan untuk membantu anggota dewan yang melaksanakan reses. (Erwandi, 2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat didorong melalui (1) proyek pembangunan bagi masyarakat desa yang dirancang sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat; (2) organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (3) peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan. Maka dari itu, untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD harus tepat sasaran.

3. Pendekatan Komunikasi Antarbudaya

Berkomunikasi berarti kita sedang berusaha untuk mencapai kesamaan makna "commonness," melalui komunikasi seseorang mencoba berbagi informasi, gagasan, atau sikap, namun terkadang kita sering mempunyai makna yang berbeda terhadap lambang yang sama. Komunikasi seharusnya dipertimbangkan sebagai aktivitas di mana tidak ada tindakan atau ungkapan yang diberi makna secara penuh, kecuali jika diidentifikasi oleh partisipan komunikasi yang terlibat.

Menurut Samovar dan Porter dalam (Darmastuti, 2013) mengatakan bahwa komunikasi antarbudaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Sedangkan Charley H. Dood dalam (Hasibuan & Muda, 2017) mengatakan

bahwa komunikasi antarbudaya meliputi komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antarpribadi, dan kelompok, dengan tekanan pada perbedaan latarbelakang kebudayaan yang mempengaruhi komunikasi para peserta.

Beberapa definisi tersebut, tampak jelas penekanannya pada perbedaan kebudayaan sebagai faktor yang menentukan dalam berlangsungnya proses komunikasi. Walaupun komunikasi antarbudaya mengakui dan memperhatikan permasalahan tentang persamaan-persamaan dan perbedaan dalam karakteristik kebudayaan antara pelaku-pelaku komunikasi, tetapi titik perhatian utamanya adalah pada proses antar individu-individu atau kelompok-kelompok yang berbedakebudayaan yang mencoba berinteraksi.

Interaksi antarbudaya sering memunculkan hambatan budaya, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam komunikasi antarbudaya dan keterampilan dalam mengelola hambatan komunikasi antarbudaya dapat menjadi bekal menumbuhkan literasi keagamaan antarbudaya. Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam komunikasi antarbudaya: Pertama, hambatan bahasa (semantik noise), (Thadi, 2021). Hambatan Bahasa (semantic noise) menjadi penghalang utama karena bahasa merupakan sarana utama terjadinya komunikasi. Gagasan, pikiran, dan perasaan dapat diketahui maksudnya ketika disampaikan lewat bahasa. Bahasa biasanya dibagi dua sifat yaitu bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Fokus kajian bahasa selalu

dihubungkan dengan perbedaan budaya (kelas, ras, etnik, norma, nilai, agama). Bahasa sebagai sebuah system sosial karena kemampuannya menggabungkan individu ke dalam suatu komunitas yang terintegrasi. Pada konsep ini perlu ditegaskan bahwa bahasa (kata dan kalimat) tidaklah bermakna apa-apa sebelum dipakai dan digunakan pada budaya tertentu, artinya konteks makna kata ada pada budaya pemakainya.

Kedua, Prasangka. Prasangka adalah sikap antipati yang didasarkan pada kesalahan generalisasi tidak luwes yang diekspresikan sebagai perasaan. Prasangka juga dapat diarahkan kepada sebuah kelompok secara keseluruhan, atau kepada seseorang hanya karena orang itu adalah anggota kelompok tersebut. Efek prasangka adalah menjadikan orang lain sebagai sasaran prasangka, misalnya mengkambing-hitamkan melalui stereotip, diskriminasi dan penciptaan jarak sosial.

Ketiga, stereotip. Stereotip adalah pandangan umum dari suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Pandangan-pandangan umum ini biasanya bersifat negatif. Artinya, bahwa pandangan yang dituju kepada komunitas tertentu. Stereotip dapat membuat informasi yang kita terima tidak akurat, dan pada umumnya stereotip bersifat negatif.

Keempat, etnosentrisme. Etnosentrisme adalah egoisme kultural. Sebuah komunitas menganggap dirinya paling superior diantara yang lain. Konsep etnosentris seringkali dipakai secara bersamaan dengan rasisme. Konsep ini mewakili suatu pengertian bahwa setiap kelompok etnik atau ras

mempunyai semangat dan ideologi untuk menyatakan bahwa kelompoknya lebih superior daripada kelompok etnik atau ras lain. Akibat ideologi ini maka setiap kelompok etnik atau ras akan memiliki sikap etnosentrisme atau rasisme yang tinggi.

Kelima, diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku yang dihasilkan oleh stereotip atau prasangka, lalu ditujukan dalam tindakan yang terbuka atau rencana tertutup untuk menyingkirkan, menjauhi, atau membuka jarak, baik bersifat fisik maupun sosial dengan kelompok tertentu (Liliweri, 2003).

B. Teori yang Relevan

1. Teori Sistem/Strukturasi

Teori Sistem/Strukturasi Anthony Giddens menjelaskan tindakan manusia (agensis) dalam konteks struktur sosial dan mengintegrasikan tindakan dan struktur. Giddens berpendapat bahwa tindakan manusia dan struktur sosial bukanlah dua konsep atau konstruksi yang terpisah, tetapi keduanya diproduksi bersama oleh tindakan dan interaksi sosial (Herry-Priyono, 2016).

Ada dualitas struktur dalam masyarakat – di satu sisi ada individu sebagai aktor dalam situasi tertentu, yang memasuki aktivitas yang berpengetahuan dan berpartisipasi dalam tindakan dan interaksi sosial dalam situasi ini. Pada saat yang sama, dunia sosial terdiri dari sistem dan struktur sosial – ini adalah aturan, sumber daya, dan hubungan sosial yang diproduksi dan direproduksi oleh aktor melalui interaksi sosial.

Studi tentang strukturasi berarti pemeriksaan dan analisis tentang cara-cara di mana sistem sosial diproduksi dan direproduksi dalam interaksi sosial. Giddens mendefinisikan strukturasi sebagai “penataan hubungan sosial lintas waktu dan ruang, berdasarkan dualitas struktur”. Giddens mengadopsi pendekatan praksis terhadap aksi sosial, yang mana aksi sosial terdiri dari perilaku yang ditetapkan (apa yang dilakukan orang dalam aksi dan interaksi sosial), praktik sosial, produksi praksis lokal, dan reproduksi praktik. Pendekatan ini mencakup pemeriksaan kondisi material tempat aktor sosial berinteraksi (situasi, konteks, tempat), dan lingkungan sosial dan material yang memungkinkan dan membatasi aksi sosial.

Giddens menekankan ruang – kedekatan atau jarak dan bagaimana hal ini dimediasi oleh teknologi dan struktur sosial– dan waktu – kontinuitas dan diskontinuitas serta organisasi aktivitas lintas waktu. Sementara praksis terletak secara lokal, karena di situlah aktor berada dan tempat interaksi sosial terjadi, tindakan ini terhubung dengan kehidupan sosial baik secara lokal maupun di wilayah geografis yang lebih luas, berpotensi, secara global. Hubungan ini bekerja dalam kedua arah – kondisi dan situasi lokal dipengaruhi oleh ide dan fitur struktural yang bersifat sosial atau bahkan global, dan praksis sosial adalah sarana yang digunakan untuk memproduksi dan mereproduksi lembaga dan struktur sosial. (Ashaf, 2006)

Giddens menggunakan konsep sistem dan struktur yang saling terkait erat dalam teori strukturasinya. Sistem adalah "pola hubungan dalam pengelompokan berbagai jenis, dari kelompok kecil yang akrab, hingga jaringan sosial, hingga organisasi besar" (sedangkan struktur adalah praktik khusus yang berkaitan dengan cara aktor sosial menangani aturan dan sumber daya. (Agusmin, n.d.) Sistem mencakup sistem sosial, budaya dan struktur mencakup struktur kelas, lembaga Pendidikan. Dalam model Giddens, sistem tampak lebih dinamis daripada struktur, dengan yang terakhir relatif tetap dan membentuk kerangka kerja bagi aktivitas sosial yang terjadi dalam sistem. Analoginya mungkin sistem pemanas atau pendingin atau sistem angkutan kota – keduanya memerlukan struktur material dan sistem angkutan membutuhkan manusia sebagai pekerja dan prosedur – tetapi masing-masing memiliki karakter dinamis berupa perubahan dan aliran, serta beberapa keteraturan dan mungkin keseimbangan.

Sebuah kota atau wilayah metropolitan secara keseluruhan dapat dianggap sebagai sistem yang memiliki kehidupan, entitas yang bergerak di dalamnya, dan hubungan sosial di antara mereka yang ada di dalamnya, dengan kecenderungan menuju keadaan keseimbangan dan juga perubahan untuk menghadapi adaptasi terhadap lingkungan dan mencapai tujuan baru atau berbeda. Sebuah kota juga memiliki struktur, sesuatu yang tetap dan mapan (struktur dan prosedur fisik), dan yang memungkinkan sistem tersebut beroperasi.

Bagi Giddens , sistem adalah “pola hubungan dalam pengelompokan semua jenis, dari kelompok kecil dan akrab, hingga jaringan sosial, hingga organisasi besar.” Artinya, pola perilaku yang diberlakukan, bentuk tindakan dan interaksi sosial yang berulang, atau “siklus abadi hubungan yang direproduksi” yang membentuk sistem sosial. Ini bisa berupa sistem seperti keluarga, kelompok sebaya, komunitas, atau kota, baik pada tingkat tatap muka atau yang ada melalui jaringan di seluruh ruang dan waktu. Sementara sistem sosial mungkin tidak memiliki kelengkapan atau penutupan sistem biologis atau ekologis, “reproduksi sistem umumnya berlangsung melalui siklus abadi hubungan yang direproduksi di mana praktik berulang merupakan tautan dan simpul”.

Tatanan interaksi Goffman berupa pertemuan tatap muka dapat dianggap sebagai salah satu bentuk sistem lokal. Jaringan yang dibangun orang melalui komunikasi cetak atau elektronik, atau pertemuan tatap muka sesekali yang terkait dengan konvensi atau konferensi, adalah contoh sistem yang semakin umum dengan perkembangan dan perluasan bentuk komunikasi dan transportasi baru yang murah. Goffman merujuk pada bentuk pertemuan "yang dimediasi", tetapi tidak terlalu memperhatikannya, dan lebih berfokus pada "tatap muka" dalam pertemuan pribadi. Pola hubungan dan bentuk interaksi yang berulang itulah yang membentuk sistem.

Bagi Giddens , struktur lebih spesifik dan terperinci daripada sistem, mengacu pada praktik terstruktur. Aturan dan sumber daya adalah dua fitur

utama struktur seperti pertukaran pasar, struktur kelas, organisasi, proses politik, dan lembaga pendidikan.

1). Aturan prosedural – bagaimana praktik dilakukan. Saling memberi dan menerima dalam pertemuan, aturan bahasa, berjalan di tengah keramaian.

Goffman (wajah, peran, jarak peran) dan etnometodologi menganalisis hal ini.

2). Aturan moral – bentuk-bentuk yang tepat untuk melaksanakan tindakan sosial. Hukum, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Ini tidak merujuk pada nilai-nilai tertinggi (misalnya nilai-nilai spiritual atau sakral), tetapi merujuk pada cara-cara yang tepat untuk melaksanakan tindakan dan interaksi sosial. Durkheim dan Parsons menekankan pentingnya hal-hal ini – norma, adat istiadat, adat istiadat, hukum .

3). Sumber daya material – alokasi sumber daya di antara aktivitas dan anggota masyarakat. Sarana produksi, komoditas, pendapatan, barang konsumsi dan barang modal. Analisis Marxis menunjukkan ketidaksetaraan yang terkait dengan alokasi.

4). Sumber daya otoritas. Organisasi formal, bagaimana waktu dan ruang diatur, produksi dan reproduksi, mobilitas sosial, legitimasi, dan otoritas. Weber menganalisis isu-isu terakhir dalam konteks kekuasaan dan pelaksanaannya, memasukkan sumber daya ini sebagai aset dalam penjelasannya tentang lokasi kelas yang kontradiktif (Herry-Priyono, 2016).

Setiap struktur memiliki aspek-aspek di atas, yang melibatkan berbagai kombinasi aturan dan sumber daya. Struktur-struktur ini dibentuk

oleh praktik-praktik terstruktur – yaitu, struktur-struktur tersebut tidak hanya ada dengan sendirinya dan tidak dapat ada tanpa perilaku yang ditetapkan. Meskipun kita dapat mengabstraksikan praktik-praktik ini dan menyebutnya sebagai struktur yang membingkai dan memengaruhi masyarakat, Giddens tertarik pada bagaimana praktik-praktik tersebut direproduksi. Perilaku manusia yang ditetapkan dalam bentuk praktik-praktik terstruktur adalah yang mempertahankan dan mereproduksi struktur-struktur ini. Namun, jika bentuk-bentuk perilaku yang ditetapkan ini berubah, baik karena individu membuat keputusan sadar untuk berubah, karena momen-momen yang menentukan, atau melalui bentuk-bentuk penyesuaian, adaptasi, dan praktik yang kurang sadar, maka hal ini dapat menghasilkan perubahan struktural. Gerakan sosial, tindakan kolektif, atau perubahan paralel oleh banyak individu dapat menghasilkan hasil ini. Giddens mencatat bahwa terkadang ada "penangguhan kritis terhadap rutinitas dan kesempatan-kesempatan di mana para aktor memobilisasi upaya mereka dan memfokuskan pikiran mereka pada tanggapan terhadap masalah-masalah yang akan mengurangi kecemasan mereka, dan pada akhirnya membawa perubahan sosial.

Bagi Giddens, "praktik terstruktur adalah unit analisis utama," mungkin paralel dengan tindakan unit dalam teori tindakan sosial Parsonian. Dalam hal teori strukturisasi secara keseluruhan, struktur dan sistem mengingatkan pada Parsons karena mereka menyediakan kerangka kerja teoritis yang mencakup semua yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek

organisasi sosial dan perubahan sosial. Satu perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa Giddens menjadikan distribusi sumber daya dan kekuasaan yang tidak merata sebagai fitur utama analisisnya, sedangkan Parsons kurang memperhatikan hal ini. Struktur dan sistem Giddens juga tampak lebih dinamis dan kurang tertutup daripada Parsons, sehingga mereka dapat mengakomodasi banyak bentuk kekuasaan dan perubahan sosial yang berbeda. Salah satu cara untuk memikirkan sistem dan struktur ini adalah sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan struktur-agensi, dengan berfokus pada sistem dan struktur sebagai pola perilaku yang diberlakukan. Sementara kita mungkin menganggap sistem dan struktur sebagai sesuatu yang eksternal bagi individu, yang memaksakan batasan pada individu, dan ada terpisah dari individu, jika aksi dan interaksi sosial berakhir, struktur sosial tidak akan ada lagi. Untuk berpikir seperti Giddens, pertimbangkan struktur sebagai praktik terstruktur. Artinya, praksis tidak ada terpisah dari struktur, dan struktur adalah pola tindakan yang bertahan lama yang dipandu oleh aturan dan sumber daya. Hubungan sosial yang terjadi di dalamnya adalah sistem teori strukturasi (Herry-Priyono, 2016).

2. Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah proses pemberian sumbangsih sukarela dari suatu kelompok masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan dimana masyarakat tentunya harus melibatkan emosi dan mental dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan mensejahterakan kehidupan mereka.

Dalam (Hakim, 2017) mengatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar.

Partisipasi pada awalnya adalah definisi politik murni yang dikembangkan pada 1950-an dan 1960-an. Selama tahun 1970-an, partisipasi mulai dikaitkan dengan tahapan administrasi dengan menambahkan latihan kerja dan proses pelaksanaan sehingga orang atau pertemuan dapat mencari situasi yang tidak dapat didamaikan dan bersaing untuk mendapatkan sedikit sumber daya.

(Yakup, 2017) mengemukakan bahwa “partisipasi merupakan turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama

mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut". Selain itu menurut partisipasi merupakan keterlibatan secara spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Beberapa unsur penting yang terdapat dalam partisipasi, yaitu: partisipasi berarti partisipasi mental dan emosional, bukan partisipasi fisik, yang akan membangkitkan kesadaran sehingga dapat meningkatkan partisipasi, kemudian partisipasi mengajak orang lain untuk ikut andil dalam mendukung kehidupannya, nantinya menjadi bagian dari masyarakat akan berdampak pada kelangsungan hidup kelompok dalam mencapai tujuan bersama, berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong seseorang untuk bertanggung jawab atas kebaikan bersama. Karena apa yang diberikan dilakukan dengan sukarela. Hal ini sesuai dengan keinginan untuk kepentingan yang lebih baik dan lebih layak dalam pelaksanaan kemajuan yang sinergis untuk manfaat jangka panjang dan dinikmati oleh secara keseluruhan.

Dari kutipan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab

terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Sedangkan pengertian masyarakat, (Mulyadi, 2012) berpendapat bahwa "masyarakat merupakan golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain". Sangat mungkin dianggap bahwa masyarakat adalah kumpulan dari berbagai pertemuan yang saling mempengaruhi.

(Garna, 2012) yang mendefinisikan masyarakat merupakan "suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang saling berubah ini dinamakan masyarakat, masyarakat ialah jalinan hubungan sosial".

Dari batasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat umum terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- a. Individu yang hidup bersama
- b. Dikumpulkan untuk jangka waktu yang lama karena hidup bersama mengembangkan sistem komunikasi dan standar yang mengawasi mereka.

c. Mereka memahami bahwa mereka adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi.

(Marhum & Meronda, 2021) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ialah: Pertama, pendidikan, kapasitas untuk membaca dan menulis, kebutuhan, posisi, posisi sosial, dan tidak adanya keberanian. Kedua, adalah faktor dalam pemahaman yang dangkal tentang negara. Ketiga, kecenderungan untuk salah mengartikan inspirasi, tujuan dan kepentingan asosiasi rakyat yang biasanya mendorong munculnya pandangan yang salah tentang keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk (pemerintah yang memiliki wewenang) dan kekurangan posisi terbuka untuk mengambil bagian dalam program perbaikan yang berbeda. Selain itu partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor internal lain. Faktor -faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Faktor usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

(Pamuji et al., 2017) mengatakan bahwa sifat dan ciri-ciri partisipasi merupakan kepentingan yang harus disengaja, isu-isu berbeda harus diperkenalkan dan diperiksa dengan jelas dan tidak memihak, kesempatan untuk mengambil bagian harus mendapatkan data yang jelas dan memuaskan tentang setiap perspektif/bagian dari program yang akan dibicarakan dan dukungan daerah setempat untuk memutuskan keyakinan diri itu sendiri harus mencakup tingkat yang berbeda dan bidang yang berbeda, bersifat dewasa, signifikan, dan ekonomis serta terkait erat dengan kemajuan.

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses menentukan kebijakan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, ditentukan tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi
- 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan
- 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat, (Firmansyah et al., 2023) mengatakan bahwa ada empat bentuk indikator yang mencakup teori inti partisipasi masyarakat dalam perannya, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di wilayahnya perlu ditumbuhkan melalui forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program yang telah disepakati bersama di wilayah setempat. Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang dilakukan, bilamana akan melakukan dan siapa yang akan melakukan. Adapun urutan bagian-bagian perencanaan yang merupakan sistematis berfikir dalam perencanaan yang meliputi: Hasil akhir (the ends) Spesifikasi dari tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran, target perencanaan. Disini ditentukan apa yang ingin dicapai dan bila mana kita akan mencapainya. Alatalat (the means) Meliputi pemilihan dari kebijaksanaan, strategi, prosedur, dan prakteknya. Disini menentukan bagaimana rencana. Sumber-sumber (the resources) Meliputi kuantitas, pendapatan, dan pengalokasian beberapa sumber antara

lain: tenaga kerja, keuangan, material, tanah, dan sebagainya. Pelaksanaan(Implementation) Menentukan prosedur pengambilan keputusan dan caramengorganisasikannya sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan. Pengawasan (control) Menentukan prosedur yang akan dilaksanakan dalam menemukan kesalahan, kegagalan dari pada rencana dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan untuk selanjutnya.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan program yang dibuat

Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang dibuat, merupakan sebuah lanjutan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan program yang dibuat.

3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi

Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik tentang masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program yang dilaksanakan secara langsung, sehingga hasil dari program yang dibuat

menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil, misalnya: memanfaatkan hasil dari sebuah program yang dibuat dengan maksimal.

C. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1). Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Tsani Rosyida (2021) dengan judul “Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Pati Dalam Rangka Penyerapan Reses” dengan hasil kesimpulan penelitian bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa perbedaan strategi komunikasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Pati. Strategi tersebut ditunjukkan melalui metode penyampaian pesan, bentuk citra diri, empati dan homofili, dan melakukan kompromi. Metode penyampaian pesan yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Pati yaitu canalizing dan informatif. Dalam membentuk citra diri, sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Pati menunjukkan citra diri sebagai wakil rakyat yang sederhana, merakyat, peduli, dan amanah. Anggota DPRD Kabupaten Pati juga melakukan empati dan membangun homofili kepada masyarakat dengan cara yang berbeda-beda. Dalam menghadapi masalah yang muncul saat reses, anggota DPRD Kabupaten Pati melakukan kompromi untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan.

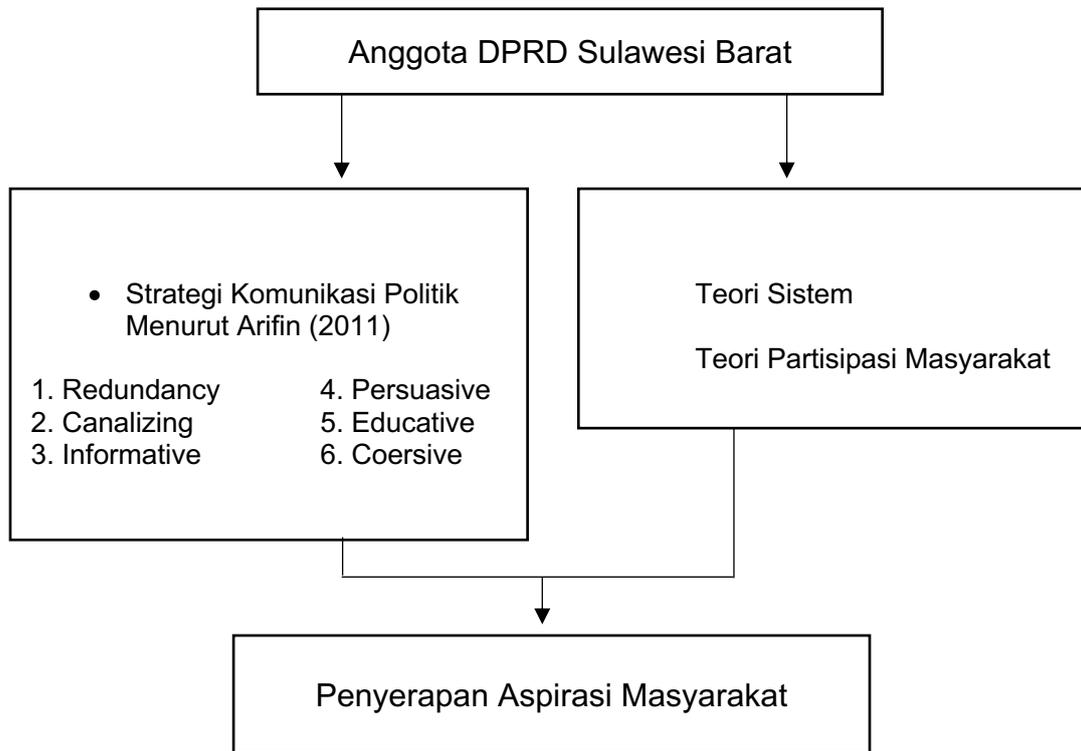
2). Penelitian yang dilakukan oleh Reza Firmansyah (2022) dengan judul “Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD dalam Melakukan Reses di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat” dengan hasil kesimpulan penelitian bahwa Hasil temuan penelitian ini adalah Pertama, program dapil III dalam kegiatan reses ini ada dua yang pertama reses yang kedua Jaringan Aspirasi Masyarakat (jasma) sebagai bentuk komunikasi anggota dewan dengan masyarakat. Kedua, anggota dewan memaksimalkan kegiatan reses ini berbeda-beda dalam konteks bentuk komunikasinya dengan masyarakat. Meski terdapat beberapa kendala dalam kegiatan reses tersebut anggota dewan memiliki cara setiap individu dalam memaksimalkan kegiatan reses yang dilaksanakan setiap satu tahun tiga kali tersebut. Ketiga, anggota DPRD juga memanfaatkan penggunaan media massa seperti platform Facebook untuk menyampaikan kegiatan Reses mereka dan membangun Personal Branding yang baik melalui postingan-postinga kegiatan mereka.

3). Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Abdul Malik (2019) dengan judul “Komunikasi Politik dalam Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019” dengan hasil kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan komunikasi politik. Pertama, anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya menjadikan reses sebagai agenda rutinitas formal. Kedua, proses komunikasi politik tidak mengakomodir kepentingan masyarakat dengan baik. Ketiga, keterbatasan

waktu pelaksanaan reses yang hanya tiga hari pelaksanaan. Keempat, komunikasi politik terkendala dengan adanya batasan wilayah politik dan tidak memperhatikan keterwakilan masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah yang penting. Teori adalah konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, perlu dibangun kerangka teori yang memuat gagasan-gagasan pokok untuk memperjelas isu-isu yang beredar. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini yaitu untuk mengetahui **Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat.**



Gambar. 1
Kerangka Pikir